

**Walhi : Pecat Menteri BUMN
Erabaru.net
July 28, 2012**

Jakarta – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menuntut Presiden SBY segera memecat menteri BUMN dan mengevaluasi perusahaan negara yang berkonflik dengan rakyat serta mengembalikan tanah rakyat yang dirampas oleh PTPN VII.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan dalam keterangan persnya yang dikutip Sabtu (28/7). Pernyataan tersebut menanggapi atas bentrokan warga dengan polisi di desa Limbung Jaya, Ogan Ollir, Sumatera Selatan,

Jumat Sore 27 Juli 2012. Bentrokan tersebut menewaskan seorang bocah laki-laki dan 4 warga lainnya ikut tertembak.

Bentrokan terjadi akibat lahan warga yang dirampas oleh PTPN VII sejak 1982 silam. Meskipun ada ganti rugi, namun warga pada saat itu berada dibawah tekanan dan intimidasi dari aparat keamanan.

Walhi juga meminta Presiden SBY memecat Menteri BUMN Dahlan Iskan dan jajarannya yang telah mengabaikan hak rakyat serta memecat jajaran direksi PTPN VII.

“Presiden segera memecat Menteri BUMN dan jajarannya yang telah mengabaikan hak rakyat dan menyebabkan terjadinya kekejaman di Kabupaten Ogan Ilir,” tegas Abetnego.

Sebelumnya upaya negosiasi dan usulan mediasi yang disampaikan oleh masyarakat juga di tolak oleh PTPN VII dan Kementerian BUMN. Penolakan tersebut terjadi saat pertemuan di Kantor Kementerian BUMN, Senin, 16 Juli 2012 lalu.

Penolakan tuntutan warga pada saat itu, dihadiri oleh Sekretaris Menteri BUMN, Deputi Menteri BUMN Bidang Industri Primer, Direktur Utama PTPN VII, Direksi PTPN VII. Warga pada saat itu menuntut dibuatnya team penyelesaian Konflik Agraria dan pengukuran ulang terhadap lahan PTPN VII secara keseluruhan sesuai dengan HGU.

Warga dalam dalam rapat tersebut juga menuntut dibukanya data dan dokumen bukti bukti lahan baik yang dimiliki warga maupun yang dimiliki PTPN VII.

“Usulan yang sudah sangat solutif inipun masih saja ditolak oleh PTPN VII dan Kementerian BUMN yang memperlihatkan tidak ada niat baik dari mereka untuk duduk bersama menyelesaikan konflik berkepanjangan ini,” kata Abetnego.

Walhi menilai tindakan Brimob Kepolisian Polda Sumatera Selatan yang menyebabkan warga tertembak hingga tewas sangat tidak manusiawi, demikian juga dengan sikap PTPN VII dan Kementerian BUMN. Walhi menuntut Kapolri menarik seluruh aparatnya di wilayah konflik.

Oleh karena itu, Walhi terus menyerukan kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia untuk tidak berhenti melakukan perlawanan terhadap perampasan hak-hak

rakyat. Walhi juga mengajak semua masyarakat memberikan dukungan terhadap perjuangan warga 20 desa di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. (Walhi/mas)

Copyright © 2003-2011 Era Baru News

Source: <http://erabaru.net/nasional/95-hukum/31186-walhi--pecat-menteri-bumn>